

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kumpulan tindakan transformasi struktural yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam perjalanan waktu, berbagai kebijakan diterapkan sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan amanat Pancasila, UUD 1945, dan kebijakan pembangunan nasional.

Tiga arah kebijakan yang saling mendukung membentuk kebijakan pembangunan nasional. Pertama, kebijakan yang tidak hanya secara tidak langsung mencapai tujuan tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi untuk tercapainya. Kedua, kebijakan yang secara langsung meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok. Ketiga, kebijakan khusus yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang langsung mencapai masyarakat miskin (Sumodiningrat, 2007).

Kurang ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan, adalah salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal. Penduduk di desa tertinggal biasanya harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (terutama pusat kecamatan), dan bahkan di desa lain, mereka harus menempuh jarak lebih dari 10 km karena kondisi jalan yang buruk. Jumlah orang yang memiliki akses ke air minum perpipaan perdesaan sangat sedikit, dan sebagian

besar dari mereka masih minum langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Namun, banyak petani di desa terpencil memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha, yang dikenal sebagai lahan marjinal. Dengan demikian, ada perlunya pendekatan untuk menangani penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat memastikan peningkatan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di perdesaan (Ikhsan, 2004).

Pemerintah memulai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007 untuk mengatasi masalah di perdesaan. Pada tahun 2016, PNPM Mandiri diperluas dengan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 161/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satu wilayah yang dipilih untuk mendapatkan program tersebut.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan dengan menggunakan sumber daya lokal, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, dan meningkatkan institusi lokal di tingkat desa. Dalam program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun 2016, kegiatan yang dapat dilaksanakan termasuk pembangunan infrastruktur skala kecil di perdesaan. Kategori infrastruktur yang telah dibangun termasuk transportasi (jalan, jembatan, titian),

peningkatan produksi pertanian (irigasi tersier), pemasaran produk pertanian (pasar desa), air bersih dan sanitasi (prasarana air bersih, MCK), dan kesehatan (pembangunan posyandu, pusat kesehatan, dan lain-lain) (Panduan Teknis PISEW, 2016).

World bank (1994) dalam laporannya menyebutkan bahwa infrastruktur berperan dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu negara dalam diversifikasi produksi, perluasan perdagangan, mengatasi pertumbuhan penduduk, menurunkan kemiskinan, atau meningkatkan kondisi lingkungan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. *World Bank (1994)* mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi sebagai terminologi yang memayungi banyak aktivitas terkait '*social overhead capital*'. Infrastruktur ekonomi (*economic infrastructure*) tersebut meliputi *public utilities* (tenaga listrik, penyediaan air, telekomunikasi, sanitasi dan pembuangan sampah, penyaluran gas), *publik work* (jalan, kanal irigasi, bendungan, jembatan, dan drainase), dan *other transport sectors* (jalan rel kereta api kota dan antar kota, pengangkutan kota, pelabuhan, jalan perairan dan bandar udara).

Salah satu kunci daya tarik suatu tempat adalah ketersediaan infrastruktur berkualitas. Untuk menjamin perekonomian beroperasi dengan efektif, efisiensi dan pembangunan infrastruktur sangat penting. Mereka juga merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi dan jenis sektor atau kegiatan yang dapat dikembangkan. Infrastruktur yang baik akan mengintegrasikan pasar nasional,

mengurangi jarak antar daerah, dan menghubungkannya dengan biaya rendah ke negara dan wilayah lain.

Karena Kabupaten Konawe Selatan adalah pusat perdagangan, pengembangan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat, terutama dalam hal pemasaran produk pertanian. Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, gedung, dan fasilitas publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi manusia (Kodoatie, 2005). Pertumbuhan ekonomi didorong oleh infrastruktur. Bisnis transportasi adalah inti dari pola distribusi baik barang maupun penumpang. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Perbaikan infrastruktur diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan aksesibilitas masyarakat yang dapat dilihat dari kelancaran arus barang dari dan ke Kabupaten Konawe Selatan dibandingkan dengan keadaan sebelum adanya program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Lancarnya arus transportasi tersebut akan mengurangi biaya dan waktu pengangkutan sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2022 terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lalembuu sepanjang 550 meter, Kecamatan Buke sepanjang 2.990 meter, dan Kecamatan Palangga sepanjang 558 meter. Pembangunan jalan lingkungan pada saat ini khususnya di Kabupaten Konawe Selatan masih belum memadai. Infrastruktur seperti jalan lingkungan sangat

dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penghubung antar hunian (perumahan), antar desa dan berdampak langsung dengan aktifitas masyarakat.

Berdasarkan masalah diatas peneliti mengangkat judul “Kajian Infrastruktur Jalan pada Program PISEW di Kabupaten Konawe Selatan” menyelesaikan permasalahan yang ada di Kecamatan tersebut dalam bidang infrastruktur jalan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi infrastruktur jalan pada program PISEW di Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana kajian infrastruktur jalan pada program PISEW di Kabupaten Konawe Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kontribusi infrastruktur jalan pada program PISEW di Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk menganalisis kajian infrastruktur jalan pada program PISEW di Kabupaten Konawe Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengembangkan pengetahuan ilmiah dan teknologi infrastruktur khususnya pada infrastruktur jalan di Kabupaten Konawe Selatan.
2. Diharapkan penggunaannya bermanfaat untuk masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur jalan untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder untuk mengetahui infrastruktur jalan pada program PISEW di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 dan 2022.
2. Metode yang digunakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Jalan Indonesia 2001 dan Buku Saku PISEW 2022.
3. Unsur yang ditinjau adalah kondisi dan capaian layanan infrastruktur jalan di Kabupaten Konawe Selatan.